



# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# RANCANGAN AKHIR RENJA 2026

**BADAN  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH**



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum .....	2
1.3.	Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4.	Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU10	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	46
2.4.	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....	58
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	82
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	83
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	83
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	86
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	88
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	102
BAB V	PENUTUP .....	115

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

2.1.1. Realisasi Anggaran BPKAD selaku Perangkat Daerah,  
selaku SKPKD dan selaku Perangkat Daerah dan SKPKD  
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 ..... 16

2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2023 -  
2024  
.....  
.....  
24

2.2.1. Capaian Kinerja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 ..... 43

2.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023 – 2024 dan  
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2025 –  
2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bekasi..... 44

2.3.1. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
BPKAD Kota  
Bekasi  
.....  
.....  
48

2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi  
Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah .....  
2.4.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah  
.....  
.....  
59

2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2024 BPKAD Kota  
Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

.....  
.....  
82

3.2.1. Tujuan Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2026  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah

.....  
.....  
88

3.3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2026 Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset  
Daerah

.....  
.....  
90

3.4. Jumlah Aparatur BPKAD Kota Bekasi Tahun  
2025

.....  
.....  
100

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan  
Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota  
Bekasi

.....  
.....  
104

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

## DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

- 3.1. Tingkat Pendidikan Aparatur BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 ..... 100
- 3.2. Sebaran Aparatur BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 ..... 101

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2026.
- 3) Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 353);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 18 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPKAD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

- pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
  3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
  4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
  5. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2026;
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi.

##### **1.1 Latar belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPKAD, proses penyusunan Renja BPKAD, keterkaitan antara Renja BPKAD dengan dokumen Renstra BPKAD Kota Bekasi

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun lalu dan Capaian Renstra BPKAD

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Dikaitkan juga dengan Pencapaian Target Renstra BPKAD berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Bekasi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terdapat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penjelasan jika rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pagu indikatif maupun kombinasi kedua hal tersebut.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BEKASI

Pada Bagian ini berisikan tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2026

## BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu menjadi perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak mencukupi sesuai kebutuhan serta rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemui.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi tahun sebelumnya juga harus dievaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Pasal 2 huruf g telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

kinerja sebagai instrumen penilaian.

### 2.1.1. **Evaluasi Capaian RENJA BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024**

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa BPKAD selain OPD juga sebagai SKPKD, maka berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bahwa BPKAD Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 sebagai OPD dan SKPKD tahun 2024 memiliki pagu Rp. 245.515.186.714,00 dengan realisasi Rp. 211.279.276.829,00 atau 86,06%, Pagu BPKAD sebagai SKPKD Rp. 202.143.945.310,00 dengan realisasi Rp.173.102.138.596,33 prosentase 85,63%. Sedangkan pagu BPKAD sebagai OPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 43.371.241.404,00 dengan realisasi Rp. 38.177.138.233,00 atau 88,02 %.

BPKAD Kota Bekasi Pada Tahun 2024 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Nilai AKIP BPKAD, indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang jika dikaitkan dengan capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Opini WTP atau sebesar 100% dari target Opini WTP sebesar (100%), atau dengan capaian kinerja sebesar 93,40 % dapat juga diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Permasalahan yang timbul dan cara mengatasi penyebabnya :

#### **Permasalahan**

➤ Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Dan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Mekanisme Tata Kelola Keuangan, Penganggaran Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Keuangan Serta Pengelolaan Aset Daerah Belum Dipahami Secara Menyeluruh Oleh SKPD;

- Masih Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Koordinasi Dalam Proses Penyusunan Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Serta Penyelesaian Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset Daerah;
- Diterbitkannya Peraturan Perundangan-Undangan atau Ketentuan Peraturan lainnya pada tahun berjalan namun tidak disertai Petunjuk Pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
- Kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset di OPD yang belum maksimal;
- Keterlambatan dan kesalahan dalam penyampaian data dari OPD kepada Bidang Aset dan Akuntansi.

#### **Rencana Tindak Lanjut**

- Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK Berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai penyelesaian Temuan BPK;
- Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dan SAPD;
- Melakukan Rekonsiliasi secara berkala atas akun-akun pada Laporan Keuangan;
- Peningkatan kualitas SDM secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pengelola Keuangan di SKPD;

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan persediaan OPD;
- Konsinyering Laporan Keuangan;

**Permasalahan**

- Tahapan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Penyusunan RKPD tidak Tepat Waktu;
- Penetapan KUA-PPAS tidak Tepat Waktu;
- Koordinasi yang kurang efektif dengan Instansi terkait dan DPRD Kota Bekasi terkait Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2025;
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan APBD;
- Kurangnya instrumen penganggaran dan Peraturan pendukung proses penganggaran;
- Masih lemahnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam pelaksanaan Verifikasi DPA APBD dan DPA Perubahan APBD.

**Rencana Tindak Lanjut**

- Mematuhi tahapan penyusunan APBD sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku mulai dari Proses Penyusunan RKPD, Penyusunan KUA dan PPAS, Rancangan APBD sampai dengan Kesepakatan APBD 2026 dengan DPRD Kota Bekasi;
- Berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perangkat Daerah terkait (Bapperida) dan DPRD Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

- Menyediakan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pendukung proses penyusunan APBD;
- Menyiapkan instrumen penganggaran dan peraturan pendukung proses penganggaran;
- Membentuk tim verifikasi DPA APBD dan DPA Perubahan APBD.

**Permasalahan**

- Penyerapan anggaran kegiatan tidak maksimal dikarenakan adanya belanja perjalanan dinas koordinasi dan belanja makan dan minum rapat yang tidak dapat diserap.

**Rencana Tindak Lanjut**

- Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer;
- Penyusunan Laporan Realisasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer;
- Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya ke Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

**Permasalahan**

- Pelaksanaan pembayaran premi asuransi bangunan milik daerah mengalami kendala yaitu dalam pelaksanaan penilaian BMD gedung/bangunan sebagai dasar penentuan premi asuransinya yang mengharuskan melibatkan banyak pihak dan waktu yang cukup sehingga tidak dapat dilaksanakan.
- Jumlah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Pertanahan Kota Bekasi tidak sesuai dengan jumlah permohonan pendaftaran sertifikat yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga target lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang bersertifikat tidak tercapai;

- Masih terdapat lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang dimanfaatkan secara illegal oleh masyarakat;
- Pencatatan dan pelaporan BMD yang tidak tepat waktu.

### **Rencana Tindak Lanjut**

- Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran asuransi atas gedung aset milik Pemerintah Kota Bekasi.
- Melanjutkan proses pendaftaran sertifikat bidang tanah milik Pemerintah Kota Bekasi dan melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak BPN Kota Bekasi atas pendaftaran sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya yang belum diterbitkan oleh BPN;
- Melanjutkan pelaksanaan pemasangan plang aset tanah milik Pemerintah Kota Bekasi;
- Meningkatkan kompetensi pengurus BMD pada perangkat daerah se kota Bekasi dan kompetensi pengelola BMD pada Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi.

Realisasi Anggaran BPKAD selaku Perangkat Daerah dan Selaku SKPKD, Selaku SKPD dan Selaku Perangkat Daerah secara terperinci dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.1.1**  
**Realisasi Anggaran BPKAD**  
**Selaku Perangkat Daerah, Selaku SKPKD dan Selaku Perangkat Daerah dan SKPKD**  
**Tahun Anggaran 2024**

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun	Urusan Keuangan	43.371.241.404	38.177.138.233	88,02	202.143.945.310,00	173.102.138.596,33	85,63	245.515.186.714	211.279.276.829	86,06
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.042.745.296	32.510.799.651	95,50	80.834.383.863,00	64.064.240.656,00	79,25	114.877.129.159	96.575.040.307	84,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	58.396.300	97,33	0,00	0,00	0,00	60.000.000	58.396.300	97,33
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	58.396.300	97,33	0,00	0,00	0,00	60.000.000	58.396.300	97,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.134.051.156,00	24.568.549.996,00	97,75	80.834.383.863	64.064.240.656	79,25	105.968.435.019,00	88.632.790.652	83,64
	Belanja Gaji Pokok PNS	5.217.616.376	5.200.127.045	99,66	1.286.374.624	404.757.580	31,46	6.503.991.000	5.604.884.625	86,18
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	506.980.879	505.270.844	99,66	319.212.121	18.149.792	5,69	826.193.000	523.420.636	63,35
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	219.626.750	202.930.000	92,40	71.780.250	-	0,00	291.407.000	202.930.000	69,64
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	269.206.000	265.340.000	98,56	257.380.000	-	0,00	526.586.000	265.340.000	50,39
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	153.042.750	133.900.000	87,49	158.995.250	23.885.000	15,02	312.038.000	157.785.000	50,57
Belanja Tunjangan Beras PNS	311.768.100	282.220.740	90,52	177.976.900	15.570.300	8,75	489.745.000	297.791.040	60,81	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.582.905	25.595.914	100,05	19.031.095	507.144	2,66	44.614.000	26.103.058	58,51
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.946	71.307	96,43	221.054	5.381	2,43	295.000	76.688	26,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.752.194.000	13.299.083.748	96,71	-	-	-	13.752.194.000	13.299.083.748	96,71
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.742.453.000	3.661.476.087	97,84	-	-	-	3.742.453.000	3.661.476.087	97,84
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	373.600.000	334.767.943	89,61	-	-	-	373.600.000	334.767.943	89,61
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72.900.000	71.919.575	98,66	-	-	-	72.900.000	71.919.575	98,66
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	438.987.301	523.314.072	119,21	57.803.056.617	48.452.316.928	83,82	58.242.043.918	48.975.631.000	84,09
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-	-	12.971.674.000	10.144.077.973	78,20	12.971.674.000	10.144.077.973	78,20
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.001.913	10.687.181	356,01	1.217.288.112	965.749.950	79,34	1.220.290.025	976.437.131	80,02
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	-	432.145.000	285.492.689	66,06	432.145.000	285.492.689	66,06
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.017.236	32.061.540	118,67	3.633.854.840	2.897.249.850	79,73	3.660.872.076	2.929.311.390	80,02
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	-	1.296.433.000	856.478.069	66,06	1.296.433.000	856.478.069	66,06
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-	288.660.000	-	0,00	288.660.000	-	0,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-	900.301.000	-	0,00	900.301.000	-	0,00

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	19.784.000	98,92	-	-	-	20.000.000	19.784.000	98,92
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17,50</b>	-	-	-	<b>100.000.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17,50</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	17.500.000	17,50	-	-	-	100.000.000	17.500.000	17,50
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.537.867.500</b>	<b>2.307.497.153</b>	<b>90,92</b>	-	-	-	<b>2.537.867.500</b>	<b>2.307.497.153</b>	<b>90,92</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.431.150.000	1.404.877.600	98,16	-	-	-	1.431.150.000	1.404.877.600	98,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.750.000	148.620.100	75,54	-	-	-	196.750.000	148.620.100	75,54
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	32.373.520	64,75	-	-	-	50.000.000	32.373.520	64,75
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	24.982.000	33,31	-	-	-	75.000.000	24.982.000	33,31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.250.000	339.535.933	84,62	-	-	-	401.250.000	339.535.933	84,62
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	383.717.500	357.108.000	93,07	-	-	-	383.717.500	357.108.000	93,07
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.087.576.000</b>	<b>1.039.550.000</b>	<b>95,58</b>	-	-	-	<b>1.087.576.000</b>	<b>1.039.550.000</b>	<b>95,58</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.087.576.000	1.039.550.000	95,58	-	-	-	1.087.576.000	1.039.550.000	95,58
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.803.250.640</b>	<b>3.583.813.558</b>	<b>94,23</b>	-	-	-	<b>3.803.250.640</b>	<b>3.583.813.558</b>	<b>94,23</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.803.250.640	3.583.813.558	94,23	-	-	-	3.803.250.640	3.583.813.558	94,23

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.320.000.000</b>	<b>935.492.644</b>	<b>70,87</b>	-	-	-	<b>1.320.000.000</b>	<b>935.492.644</b>	<b>70,87</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	520.000.000	336.428.100	64,70	-	-	-	520.000.000	336.428.100	64,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	174.853.200	69,94	-	-	-	250.000.000	174.853.200	69,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	424.211.344	77,13	-	-	-	550.000.000	424.211.344	77,13
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>5.145.343.208</b>	<b>4.210.638.567</b>	<b>81,83</b>	<b>121.309.561.447,00</b>	<b>109.037.897.940,33</b>	<b>89,88</b>	<b>126.454.904.655</b>	<b>113.248.536.507</b>	<b>89,56</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.944.314.500</b>	<b>1.641.316.240</b>	<b>84,42</b>	-	-	-	<b>1.944.314.500</b>	<b>1.641.316.240</b>	<b>84,42</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.000.000	100.962.650	83,44	-	-	-	121.000.000	100.962.650	83,44
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	125.000.000	66.410.000	53,13	-	-	-	125.000.000	66.410.000	53,13
	Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	61.329.900	51.940.000	84,69	-	-	-	61.329.900	51.940.000	84,69
	Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	61.329.900	6.192.000	10,10	-	-	-	61.329.900	6.192.000	10,10
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	47.574.900	29.723.000	62,48	-	-	-	47.574.900	29.723.000	62,48

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	50.649.800	43.721.640	86,32	-	-	-	50.649.800	43.721.640	86,32
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	158.892.000	146.297.150	80,00	-	-	-	158.892.000	146.297.150	92,07
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	236.625.000	231.692.298	97,92	-	-	-	236.625.000	231.692.298	97,92
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.500.000	119.455.500	85,63	-	-	-	139.500.000	119.455.500	85,63
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	270.027.000	225.799.302	83,62	-	-	-	270.027.000	225.799.302	83,62
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	211.480.000	205.015.000	96,94	-	-	-	211.480.000	205.015.000	96,94
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	460.906.000	414.107.700	89,85	-	-	-	460.906.000	414.107.700	89,85
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.155.255.708</b>	<b>907.542.070</b>	<b>78,56</b>	-	-	-	<b>1.155.255.708</b>	<b>907.542.070</b>	<b>78,56</b>
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	685.228.708	640.630.000	93,49	-	-	-	685.228.708	640.630.000	93,49
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	107.472.000	-	0,00	-	-	-	107.472.000	-	0,00

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	115.760.000	92.714.400	80,09	-	-	-	115.760.000	92.714.400	80,09
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	82.440.000	39.427.670	47,83	-	-	-	82.440.000	39.427.670	47,83
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.355.000	97.970.000	93,88	-	-	-	104.355.000	97.970.000	93,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.000.000	36.800.000	61,33	-	-	-	60.000.000	36.800.000	61,33
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>2.045.773.000</b>	<b>1.661.780.257</b>	<b>81,23</b>	-	-	-	<b>2.045.773.000</b>	<b>1.661.780.257</b>	<b>81,23</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	196.490.000	189.049.730	96,21	-	-	-	196.490.000	189.049.730	96,21
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	62.150.000	56.112.000	90,28	-	-	-	62.150.000	56.112.000	90,28
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	193.695.000	159.294.400	82,24	-	-	-	193.695.000	159.294.400	82,24
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	243.788.000	182.671.169	74,93	-	-	-	243.788.000	182.671.169	74,93

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	159.798.000	96.198.470	60,20	-	-	-	159.798.000	96.198.470	60,20
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Akuntansi	191.375.000	141.316.679	73,84	-	-	-	191.375.000	141.316.679	73,84
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	312.880.000	238.275.400	76,16	-	-	-	312.880.000	238.275.400	76,16
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	482.656.000	437.725.109	90,69	-	-	-	482.656.000	437.725.109	90,69
	Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	202.941.000	161.137.300	79,40	-	-	-	202.941.000	161.137.300	79,40
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	-	-	-	<b>121.309.561.447,00</b>	<b>109.037.897.940</b>	<b>89,88</b>	<b>121.309.561.447</b>	<b>109.037.897.940</b>	<b>89,88</b>
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	15.969.208.697	3.697.545.190	23,15	15.969.208.697	3.697.545.190	23,15
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	105.340.352.750	105.340.352.750	100,00	105.340.352.750	105.340.352.750	100,00
	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
	Penyusunan Standar Harga	368.273.900	140.876.000	38,25	-	-	-	368.273.900	140.876.000	38,25
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	114.225.000	75.352.523	65,97	-	-	-	114.225.000	75.352.523	65,97
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	300.000.000	29.476.000	9,83	-	-	-	300.000.000	29.476.000	9,83
	Pengamanan Barang Milik Daerah	973.132.000	392.044.852	40,29	-	-	-	973.132.000	392.044.852	40,29
	Penilaian Barang Milik Daerah	1.450.000.000	95.016.000	6,55	-	-	-	1.450.000.000	95.016.000	6,55
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	421.280.000	281.750.600	66,88	-	-	-	421.280.000	281.750.600	66,88
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000	- -	0,00	-	-	-	100.000.000	-	0,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	456.242.000	441.184.040	96,70	-	-	-	456.242.000	441.184.040	96,70

Sumber data : Aplikasi SIMDA tahun 2024

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.1.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan**  
**Pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2023 - 2024**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					TARGET 2024	REALISASI 2024	TINGKAT REALISASI (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	80%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	100%	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	172 Paket	172 Paket	172 Paket	168 Paket	97,13 %	172 Paket	172 Paket	97,13 %	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	18 Orang	9 Orang	9.15%	18 Orang	18 Orang	9.15%	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	72 Orang	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	24 Unit	24 Unit	0	0	0	0	0	0	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	24 Laporan	68.57%	35 Laporan	35 Laporan	68.57%	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201 Laporan	201 Laporan	201 Laporan	181 Laporan	90.05%	201 Laporan	201 Laporan	90.05%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.888 Box	1.888 Box	1.888 Box	1.888 Box	100%	1.888 Box	1.888 Box	100%	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1)2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	50 Unit	0	0	0	0	0	0	0	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1)2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	SKPD										
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	46 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit	100%	46 Unit	46 Unit	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun (n-1)2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	100%	69 Unit	69 Unit	100%	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	100%	80 Unit	80 Unit	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
		1. Ketepatan waktu penetapan APBD	Grade A	Grade A	Grade A	Grade A	100%	Grade A	Grade A	100%	
		2. Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Presentase Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Presentase Kesesuaian pelaporan penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang diterima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Presentase OPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dengan tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
21	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
22	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
25	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%	
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
28	Koordinasi, Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
29	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
30	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	74 Orang	74 Orang	74 Orang	100%	74 Orang	74 Orang	100%	
VIII	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	
34	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 orang	110 orang	110 orang	110 orang	100%	110 orang	110 orang	100%	
35	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
IX	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						100%			100%	
37	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas, Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
87	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
40	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
41	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
43	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	147 orang	147 orang	147 orang	147 orang	100%	147 orang	147 orang	100%	
44	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53 Lembaga	53 Lembaga	53 Lembaga	53 Lembaga	100%	53 Lembaga	53 Lembaga	100%	
45	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah										

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Aset antara LBMD dengan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	2.302 Bidang	828 Bidang	554 Bidang	544 Bidang	98.01%	554 Bidang	554 Bidang	98.01%	
X	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
47	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	
48	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (N-2)			Target Program Dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Ket
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun (n-1) 2025 Triwulan 3	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	
50	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
51	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%	
52	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100%	90 Orang	90 Orang	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan, merupakan rangkaian proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, di dalam rangkaian proses tersebut terdapat irisan fungsi manajemen aset atau pengelolaan BMD. Rangkaian proses tersebut sangat kompleks antara satu dengan yang lainnya saling terkait, sehingga untuk memotret gambaran jalannya proses tersebut akan dilihat melalui audit pelaporan sebagai representatif proses tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD yang merupakan proses akhir dari siklus keuangan akan di audit setiap tahun oleh BPK dimana ada empat kategori hasil penilaian (opini) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu :

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan
- Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion* : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

umum di Indonesia

- Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para *stakeholder*-nya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan penting dalam :

- 1) penyajian laporan keuangan (LKPD) harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (akrual);
- 2) informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahami isinya.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Kinerja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	100 %

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Tahun 2023 – 2024 dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2025 - 2026**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi**

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100%	100%	
			Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	N/A	N/A	34.99	45.18	N/A	N/A	100%	100%	
			Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	N/A	N/A	84	85	N/A	N/A	100%	100%	
			Persentase penambahan nilai aset tetap	N/A	N/A	4	5	N/A	N/A	100%	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	N/A	N/A	22.57	30	N/A	N/A	100%	100%	
			Persentase penurunan SILPA	N/A	N/A	-15%	-10%	N/A	N/A	100%	100%	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPKAD Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPKAD Kota Bekasi yang meliputi Ketentuan Umum, Organisasi Badan, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan penutup.

BPKAD Kota Bekasi mendukung visi Kepala Daerah yaitu “Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera” sedangkan untuk misi, BPKAD Kota Bekasi termasuk ke dalam misi kelima yaitu *Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai Kota bertaraf Internasional yang keren.*

Dari hasil identifikasi permasalahan yang ditemui sampai dengan triwulan I tahun 2025, dapat dirumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur BPKAD;
2. Belum optimalnya pemanfaatan informasi teknologi dalam menunjang proses pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien;
3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
4. Belum optimalnya realisasi fisik dan keuangan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam DPA tahun 2025;
5. Belum optimalnya proses koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Masih kurangnya kompetensi pengurus barang dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan isu-isu tersebut maka untuk meminimalisir permasalahan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Sesuai Tugas Pokok Aparatur;
2. Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Teknologi di Lingkungan BPKAD;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Standar;
4. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Untuk Meningkatkan Realisasi Fisik dan Keuangan;
5. Melakukan Perjanjian Kerjasama Dengan Instansi Vertikal Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Perundangan.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.3.1**  
**Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi**

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
1	2	3	4	5	7	9	10
1	Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
2	Masih Kurangnya kompetensi Aparatur dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Terbatasnya akses untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Terbatasnya Aparatur yang mempunyai Kompetensi dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum disesuaikan dengan Permendagri

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
							Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Terdapatnya pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang belum teradministrasi dengan baik.	Ketidaklengkapan berkas pengembalian STS dan input data pengembalian tidak tepat waktu.	Keterlambatan penyusunan laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah masih 25% yang teradministrasikan dengan baik.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
4	Belum Optimalnya Sinergi antar Instansi dalam mematuhi tahapan penyusunan APBD.	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing- masing tahapan penyusunan APBD.	Keterlambatan Dokumen Pendukung pada tahapan penyusunan APBD.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Tanggal kesepakatan Berita Acara Penyerahan KUA PPAS, Berita Acara Kesepakatan KUA PPAS.
5	Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran terkait RKA.	Dinamisasi terkait peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Banyaknya usulan dari OPD untuk melakukan perubahan uraian belanja.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sample surat Perangkat Daerah tentang Usulan Pergeseran Anggaran Belanja yang sudah

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
							ditetapkan pada APBD murni.
6	Masih kurangnya Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan/kegiatan di perangkat daerah.	Terbatasnya akses untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam Penyusunan Laporan Keuangan.	Terbatasnya Aparatur yang mempunyai Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Keuangan.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sample surat perangkat Daerah ke BPKAD tentang permohonan Reklasifikasi Belanja dan Surat Perangkat Daerah ke BPKAD tentang permohonan pendampingan penyusunan laporan keuangan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
							perangkat daerah
7	Masih Kurangnya kompetensi Aparatur Perangkat Daerah dan Pengelola BMD dalam Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Terbatasnya akses untuk meningkatkan kompetensi aparatur Perangkat Daerah dan Pengelola BMD dalam Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Terbatasnya Aparatur Perangkat Daerah dan Pengelola BMD yang mempunyai Kompetensi dalam Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rekonsiliasi BMD dan Pelaporan BMD per Triwulan belum bisa dilaksanakan sesuai target.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
8	Ketidakpatuhan pihak ketiga dalam melaksanakan isi perjanjian pemanfaatan BMD.	Kurang Optimalnya Pemanfaatan BMD.	Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan Potensi Pemanfaatan BMD.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Dokumen Pembahasan permasalahan Pengelolaan Pasar milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak ketiga.
9	Ketidaklengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat.	Tidak terpenuhinya persyaratan untuk pensertifikatan.	Rendahnya Persentase tanah pemerintah kota Bekasi yang sudah bersertifikat.	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Laporan tentang realisasi tanah Pemerintah Kota Bekasi yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah tanah Pemerintah Kota

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Data Pendukung*)
						(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
							Bekasi yang diajukan permohonan pendaftaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Sumber data : Renstra BPKAD 2025 - 2029

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2026 merupakan kegiatan dan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan. Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BPKAD Kota Bekasi dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kota Bekasi dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.4 sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.4.1.**  
**Review terhadap RKPD Kota Bekasi Tahun 2026**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja 2026					Catatan Penting
	Urusan/Skpd/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja		Pagu	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Indikator	Target	Indikatif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KEUANGAN						KEUANGAN					
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi			149.252.092.700	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	- Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran - Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah - Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		134.274.849.860	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	136.678.250.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	130.248.476.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/ Bulan	136.668.250.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/ Bulan	130.243.476.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					960.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				900.000.000	
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		960.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	900.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			600,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		160,477,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178 Stel		200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178 Stel	110.477.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	50,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Peserta	100 Orang	250.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Peserta	100 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.910.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2.183.620.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	900.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.300.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	100,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	360,000,000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	250,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	300.000.000	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	333.620.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.063.842.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		52.276.860	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.063.842.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.276.860	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.890.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		720.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara	21 Unit	1.500,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di	20 Unit	300,000,000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan pajaknya			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pelihara dan dibayarkan pajaknya		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	69 Unit	750,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	71 Unit	200,000,000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	70 Unit	640.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	60 Unit	220.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>17.355.709.849</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>33.565.000.000</b>	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				<b>2.065.885.000</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Ketepatan Waktu Penetapan APBD Presentase Kesesuaian Dpa Dengan Penjabaran APBD</b>		<b>1.360.000.000</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	110.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	130.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	67.330.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	70.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	1 Dokumen	67.330.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	62.575.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	30.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi perubahan DPA - SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	65.650.000	Koordinasi, Penyusunan Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi perubahan DPA – SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	45.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	184.740.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	220.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	300.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	135.620.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Dokumen	263.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Dokumen	139.640.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Laporan	250.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Laporan	0
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Sumber	77 Orang	430.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Sumber	77 Orang	200.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>				<b>779.355.000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>				<b>460.000.000</b>	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Aplikasi	150.000.000	Koordinasi Dan Penggeloan Kas Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Aplikasi	100.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Intansi terkait	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemutungan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	36 Dokumen	154.355.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan dan Pengeluaran Kas serta Pemutungan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	36 Dokumen	100.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan	2 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan	2 Laporan	30.000.000
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan			Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan		Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan		

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

			an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Fihak ketiga (PFK)		Fihak ketiga (PFK)			
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	30.000.000		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Kota Bekasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kota Bekasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	0		

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	200.000.000	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>1.870.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu</b>		<b>1.745.000.000</b>	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	265.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	150.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	<b>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</b>	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	55.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Bekasi	<b>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</b>	4 Dokumen	70.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	175.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	175.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	200.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Bekasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Kota Bekasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

						APBD Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	150.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	300.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	250.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa n Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	500.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53 Lembaga	100.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53 Lembaga	100.000.000	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>12.640.469.849</b>					<b>30.000.000.000</b>	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12.640.469.849		Kota Bekasi			30.000.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>3.750.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>3.850.000.000</b>	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				<b>3.750.000.000</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD</b>		<b>3.850.000.000</b>	
								<b>Bidang Tanah Milik Pemkot Bekasi</b>			
	Penyusunan Standar Harga	Kota Bekasi	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Laporan	400.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kota Bekasi	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Laporan	150.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.000.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	800.000.000
Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	250.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	250.000.000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11 Laporan	100.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11 Laporan	0	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	150 Orang	300.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

						Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
						Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	
<b>TOTAL</b>					<b>170.357.802.549</b>	<b>TOTAL</b>					<b>171.689.849.860</b>

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil penelaahan terhadap usulan program dan Kegiatan masyarakat yang disampaikan dalam pelaksanaan musrenbang ditingkat kelurahan dan kecamatan Se Kota Bekasi dan pada musrenbang tingkat Kota Bekasi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kota Bekasi Tahun 2026 tidak terdapat usulan dari para Pemangku Kepentingan, baik dari Kelompok Masyarakat, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah lain.

**Tabel 2.5.1**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari**  
**Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2026 BPKAD Kota Bekasi**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
----- NIHIL -----					

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN BPKAD**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional BPKAD Kota Bekasi menginduk kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

**3.1.1. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan**

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029 yaitu "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi Kementerian Keuangan yaitu :

- 1) Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi;
- 2) Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional;
- 3) Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel dan inovatif;
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

#### Tujuan Kementerian Keuangan

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, ditetapkan 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi;
2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional;
3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat;
4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik;
5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

#### Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu :

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif;
2. Pendapatan negara yang maksimal dan berkeadilan;
3. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan yang modern;
5. Pengelolaan kekayaan negara yang produktif serta pengelolaan pembiayaan yang kreatif dan risiko yang prudent;
6. Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal;
7. TIK yang andal dan berkualitas;
8. Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan
9. Pencapaian tugas khusus yang efektif.

### **3.1.2. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri**

Visi dan misi Kementerian Dalam Negeri untuk periode 2025-2029 tidak tersedia secara spesifik dalam dokumen khusus, karena dokumen perencanaan utama yang menjadi acuan Kementerian Dalam Negeri adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat sasaran pembangunan nasional. Namun, misi Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan RPJMN yaitu fokus terhadap penguatan ideologi Pancasila, peningkatan SDM aparatur, dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk mendukung pencapaian tujuan nasional seperti penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Fokus Pembangunan Nasional 2025-2029 sesuai RPJMN 2025-2029 mengarah pada tiga sasaran utama yaitu :

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

- 1) Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan target indeks modal manusia mencapai 0,59;
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, menuju target 8 persen pada tahun 2029.

Keterkaitan RPJMN dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri akan mencakup :

- Memperkuat ideologi Pancasila, untuk menjaga kebhinekaan, persatuan, dan stabilitas politik;
- Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, melalui peningkatan SDM untuk pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- Meningkatkan sinergi pembangunan daerah, melalui efektivitas desentralisasi, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, serta tata kelola keuangan daerah yang akuntabel;
- Penguatan administrasi kewilayahan termasuk administrasi kependudukan dan penataan wilayah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, yaitu **“Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif”** dengan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”**.

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkontribusi dalam pencapaian sasaran Program Prioritas yang diperkenalkan dengan istilah Gerakan Kobe Berkinerja yaitu melalui program peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

di perumahan.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2025-2029, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Profesional dan Akuntabel**, dengan Indikator Tujuan yaitu **Indeks pengelolaan keuangan daerah** hal ini secara substansi mencerminkan integrasi dari dua urusan utama yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu urusan keuangan dan urusan barang milik daerah.

Guna mewujudkan tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai dan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka ditetapkan sasaran dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu **Mencapai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Per undangan-undangan** dengan Indikator sasaran yaitu **Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .**

Target dari Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai BPKAD pada tahun 2025, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 3.2.1**  
**Tujuan Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2026**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75.07
2.		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber data : Renstra BPKAD Tahun 2025-2029.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh BPKAD Kota Bekasi. Setiap program memiliki

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

fungsi masing-masing berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Renja BPKAD Kota Bekasi sebanyak 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari 3 (tiga) program diatas kemudian dijabarkan menjadi **12 (dua belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan** dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 170.357.802.549 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang menunjang indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 3.3.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2026**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
	Keuangan				171.689.849.860				170.357.802.549					
5	2	01	2		134.274.849.860	-	-		130.188.484.400					
5	2	01	2	01										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	10.000.000	APBD	-	100%	170.000.000					
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	5.000.000	APBD	-	2 Dokumen	150.000.000
5	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	5.000.000	APBD	-	4 Laporan	20.000.000
5	2	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	130.274.849.860	APBD	-	100%	125.004.084.400

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	2	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2700 Orang/ Bulan	130.248.476.000	APBD	-	2700 Orang/ Bulan	124.984.084.400
5	2	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	5.000.000	APBD	-	1 Laporan	20.000.000
5	2	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				900.000.000	APBD	-		926.380.000
5	2	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	15 Unit	900.000.000	APBD	-	15 Unit	926.380.000
5	2	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			160.477.000	APBD	-		730,000,000
5	2	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	178 Stel	110.477.000	APBD	-	178 Stel	200.000.000
5	2	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	19 Orang	50,000,000	APBD	-	19 Orang	100,000,000
5	2	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	Kota Bekasi	100 Orang	0	APBD	-	100 Orang	430.000.000
5	2	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.183.620.000	APBD	-		2.343.620.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	2	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	1.300.000.000	APBD	-	8 Paket	1.300.000.000
5	2	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	APBD	-	2 Paket	200.000.000
5	2	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	9 Dokumen	50,000,000	APBD	-	9 Dokumen	50,000,000
5	2	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	35 Laporan	50,000,000	APBD	-	35 Laporan	75,000,000
5	2	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	200 Laporan	250,000,000	APBD	-	200 Laporan	380,000,000
5	2	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1200 Dokumen	333.620.000	APBD	-	1200 Dokumen	333.620.000
5	2	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			52.276.860	APBD	-		44.400.000
5	2	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	52.276.860	APBD	-	12 Laporan	44.400.000
5	2	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi		720,000,000	APBD	-		970,000,000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	2	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bekasi	21 Unit	300,000,000	APBD	-	21 Unit	500,000,000
5	2	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bekasi	69 Unit	200,000,000	APBD	-	69 Unit	250,000,000
5	2	01	2	09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Bekasi	70 Unit	220.000.000	APBD	-	70 Unit	220.000.000
5	02	02	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				33.565.000.000	APBD	-		37.0256.918.149
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Kota Bekasi		1.360.000.000	APBD	-		1.947.792.000
5	02	02	2	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	115.000.000	APBD	-	2 Dokumen	125.000.000
5	02	02	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	115.000.000	APBD	-	2 Dokumen	125.000.000
5	02	02	2	01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	70,000,000	APBD	-	1 Dokumen	64.330.000
5	02	02	2	01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	25,000,000	APBD	-	1 Dokumen	64.330.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	02	02	2	01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	30,000,000	APBD	-	1 Dokumen	55.400.000
5	02	02	2	01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	45,000,000	APBD	-	1 Dokumen	62.900.000
5	02	02	2	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	4 Dokumen	184,740,000	APBD	-	4 Dokumen	175.000.000
5	02	02	2	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bekasi	2 Peraturan	300,000,000	APBD	-	2 Peraturan	395.075.000
5	02	02	2	01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	1 Dokumen	135.620.000	APBD	-	1 Dokumen	120.000.000
5	02	02	2	01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Bekasi	1 Dokkumen	139.640.000	APBD	-	1 Dokumen	172.175.000
5	02	02	2	01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	1 Laporan	0	APBD	-	1 Laporan	223.804.000
5	02	02	2	01	0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber	Kota Bekasi	77 orang	200.000.000	APBD	-	77 Orang	464.778.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima			460.000.000	APBD	-		732.001.000
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bekasi	1 Aplikasi	100.000.000	APBD	-	1 Aplikasi	105.000.000
5	02	02	2	02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Bekasi	36 Dokumen	100.000.000	APBD	-	36 Dokumen	134.355.000
5	02	02	2	02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	1 Dokumen	30.000.000	APBD	-	1 Dokumen	49.926.000
5	02	02	2	02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Dokumen	0	APBD	-	1 Dokumen	122.720.000
5	02	02	2	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100 Orang	200.000.000	APBD	-	100 Orang	245.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	02	02	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Bekasi	2 Laporan	75.000.000	APBD	-	2 Laporan	75.000.000
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu		100%	1.745.000.000	APBD	-	100%	2.076.306.000
5	02	02	2	03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	4 Laporan	150.000.000	APBD	-	4 Laporan	197.212.000
5	02	02	2	03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Kota Bekasi	4 Dokumen	70.000.000	APBD	-	4 Dokumen	70.758.000
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	3 Laporan	175.000.000	APBD	-	3 Laporan	200.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Bekasi	2 Laporan	200.000.000	APBD	-	2 Laporan	175.000.000
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Dokumen	100.000.000	APBD	-	2 Dokumen	175.000.000
5	02	02	2	03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	3 Dokumen	150.000.000	APBD	-	3 Dokumen	150.000.000
5	02	02	2	03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	5 Dokumen	300.000.000	APBD	-	5 Dokumen	508.336.000
5	02	02	2	03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	44 Orang	500.000.000	APBD	-	44 Orang	500.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

5	02	02	2	03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Bekasi	53 Lembaga	100.000.000	APBD	-	53 Lembaga	100.000.000
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				32.270.819.149	APBD	-		32.270.819.149
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bekasi	1 Laporan	32.270.819.149	APBD	-	1 Laporan	32.270.819.149
5	02	03	2			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.850.000.000	APBD	-		3.142.400.000
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD			3.850.000.000	APBD	-		3.142.400.000
							Bidang Tanah Milik Pemkot Bekasi				APBD	-		
5	02	03	2	01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Bekasi	1 Laporan	150.000.000	APBD	-	1 Laporan	200.000.000
5	02	03	2	01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	APBD	-	1 Laporan	100.000.000
5	02	03	2	01	0005	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	1.000.000.000	APBD	-	1 Laporan	300.000.000
5	02	03	2	01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	3 Laporan	800.000.000	APBD	-	3 Laporan	1.000.000.000
5	02	03	2	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Kota Bekasi	5 Dokumen	250.000.000	APBD	-	5 Dokumen	250.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sesuai penjelasan program dan Rumusan kegiatan tahun 2026 didukung oleh 164 aparatur yang terdiri dari 85 orang laki laki dan 78- orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 92 PNS dan 72 Tenaga Kontrak Kerja (TKK), sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

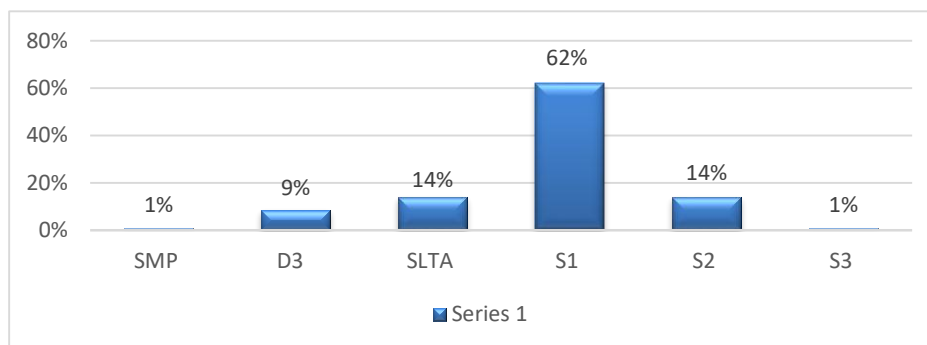
**Tabel 3.4**  
**Jumlah Aparatur BPKAD Kota Bekasi**  
**Tahun 2025**

NO	URAIAN	JUMLAH	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Jumlah PNS	92	43	49
	- Golongan IV	9	2	7
	- Golongan III	75	35	40
	- Golongan II	8	6	2
2	Jumlah TKK	72	42	30
Jumlah Total PNS dan TKK		164	85	79

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur BPKAD mempunyai tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 102 orang atau 62%, disusul S2 sebanyak 23 orang atau 14%, SLTA sebanyak 23 orang atau 14%, D3 sebanyak 14 orang atau 9%, S3 sebanyak 1 orang atau 1%, dan SMP sebanyak 1 orang atau 1%. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

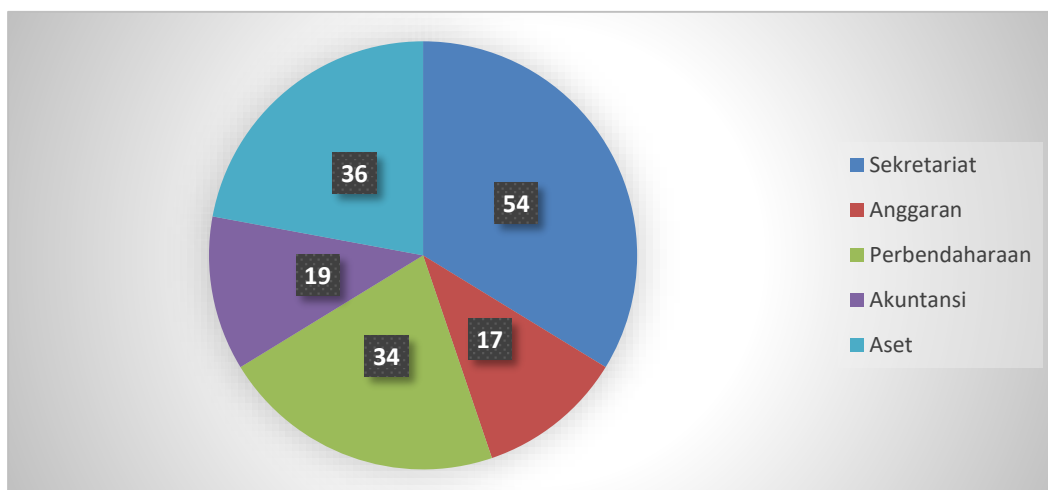
**Gambar 3.1.**  
**Tingkat Pendidikan Aparatur BPKAD Kota Bekasi**  
**Tahun 2025**



Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**Gambar 3.2.  
Sebaran Aparatur BPKAD Kota Bekasi  
Tahun 2025**



Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Secara kuantitas jumlah aparatur BPKAD sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Renstra BPKAD 2025 – 2029 maupun yang telah dirumuskan kedalam Renja BPKAD Tahun 2026.

Meskipun demikian, secara kualitas BPKAD masih memerlukan peningkatan kompetensi aparatur agar dapat mencapai kinerja lebih optimal, seperti Pengelola BMD, Penilai BMD, Sarjana Informatika, Sarjana Akuntansi terkait penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan BMD.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, maka BPKAD menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta menyusun peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Bekasi sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi Periode 2025 - 2029 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program untuk menghasilkan keluaran (*Output*). Secara keseluruhan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dan SKPKD pada Tahun Anggaran 2026 diusulkan sebesar Rp. 171.689.849.860, 12 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, dapat dirumuskan sebagai berikut ;

- **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**  
Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab diperlukan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, untuk itu APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
- **Disiplin Anggaran**  
Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- **Keadilan Anggaran**  
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**  
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

**Rekapitulasi Program dan Kegiatan BPKAD pada tahun 2026 terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan dengan 56 Sub Kegiatan.** Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 disebutkan bahwa untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak masuk dalam nomenklatur BPKAD.

Berikut Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 yang diperlukan untuk mencapai target tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan :

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif  
Program dan Kegiatan Tahun 2026  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				171.689.849.860	
	KEUANGAN				171.689.849.860	
5 02 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				134.274.849.860	
5 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	15.000.000	APBD
5 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	10.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	5.000.000	APBD
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah		100%	134.274.849.860	APBD
5 02 01 2 01 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	4704 Orang/bulan	130.248.476.000	APBD
5 02 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	5.000.000	APBD
5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan		100%	900.000.0000	APBD
5 02 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bekasi	63 Unit	900.000.000	APBD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				171.689.849.860	
	KEUANGAN				171.689.849.860	
5 02 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				134.274.849.860	
5 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	15.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	10.000.000	APBD
5 02 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	5.000.000	APBD
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah		100%	134.274.849.860	APBD
5 02 01 2 01 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	4704 Orang/bulan	130.248.476.000	APBD
5 02 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	5.000.000	APBD
5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan		100%	900.000.0000	APBD
5 02 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bekasi	63 Unit	900.000.000	APBD
5 02 01 2 07	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	160.477.000	APBD
5 02 01 2 07 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	167 Paket	110.477.000	APBD
5 02 01 2 07 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Kota Bekasi	19 Orang	50.000,000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan dan Pelatihan				
5 02 01 2 07 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	172 Orang	0	APBD
5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.183.620.000	APBD
5 02 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	1.300.000.000	APBD
5 02 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	APBD
5 02 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	10 Dokumen	50,000,000	APBD
5 02 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	35 Laporan	50,000,000	APBD
5 02 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	200 Laporan	250,000,000	APBD
5 02 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1200 Dokumen	333.620.000	APBD
5 02 01 2 06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	6.063.842.700	APBD
5 02 01 2 06 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota Bekasi	12 Laporan	6.063.842.700	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		Umum Kantor yang Disediakan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				900.000.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		64 unit	900.000.000	APBD
5 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		100%	720.000.000	APBD
5 02 01 2 09 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bekasi	20 Unit	300,000,000	APBD
5 02 01 2 09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bekasi	71 Unit	200,000,000	APBD
5 02 01 2 09 0006	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	60 Unit	220.000.000	APBD
5 02 02 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				33.565.000.000	APBD
5 02 02 2 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD		A Grade	1.360.000.000	APBD
5 02 02 2 01 000 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	115.000.000	APBD
5 02 02 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	115.000.000	APBD
5 02 02 2 01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	70.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 02 2 01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	25.000.000	APBD
5 02 02 2 01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	30.000.000	APBD
5 02 02 2 01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	45.000.000	APBD
5 02 02 2 01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	4 Dokumen	184.740.000	APBD
5 02 02 2 01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bekasi	2 Peraturan	300.000.000	APBD
5 02 02 2 01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	1 Dokumen	135.620.000	APBD
5 02 02 2 01 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Bekasi	3 Dokumen	139.640.000	APBD
5 02 02 2 01 0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	1 Dokumen	0	APBD
5 02 02 2 01 0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan Penganggar an Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber	Kota Bekasi	220 Orang	200.000.000	APBD
5 02 02 2 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM			460.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		yang Diterima				
5 02 02 2 02 000 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	100.000.000	APBD
5 02 02 2 02 000 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Bekasi	3 Dokumen	100.000.000	APBD
5 02 02 2 02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	1 Dokumen	30.000.000	APBD
5 02 02 2 02 000 1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Dokumen	0	APBD
5 02 02 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Kota Bekasi	2 Laporan	30.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
5 02 02 2 02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	500 Orang	200.000.000	APBD
5 02 02 2 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu			1.745.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	4 Laporan	150.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapata n-LO, dan Beban	Kota Bekasi	4 Dokumen	70.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	3 Laporan	175.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Bekasi	2 Laporan	200.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 02 2 03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Dokumen	100.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	3 Dokumen	150.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	3 Dokumen	300.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1997 Orang	500.000.000	APBD
5 02 02 2 03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Bekasi	53 Lembaga	100.000.000	APBD
5 02 02 2 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				30.000.000.000	APBD
5 02 02 2 04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bekasi	1 Laporan	30.000.000.000	APBD
5 02 03 2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.850.000.000	APBD
5 02 03 2 01	Pengelolaan Barang Milik			100 %	3.850.000.000	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah					
5 02 03 2 01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Bekasi	1 Laporan	150.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	1.000.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	3 Laporan	800.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	5 Dokumen	250.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	150 Orang	300.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	1.000.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	50.000.000	APBD
5 02 03 2 01 0009	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	0	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 03 2 01 0009	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	0	APBD
5 02 03 2 01 0009	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	0	APBD
<b>TOTAL</b>					<b>171.689.849.860</b>	

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen ini menggambarkan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 guna menunjang tercapainya tujuan dan sasaran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029*. Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi memuat **3 Program, 12 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp.171.689.849.860.**

Dalam pelaksanaannya, Kota Bekasi dihadapkan pada situasi dimana kondisi fiskal saat ini menuntut untuk semakin cermat, transparan, dan akuntabel dalam menyusun rencana kerja. Amanat pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja tetap menjadi pedoman kita bersama artinya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar prioritas, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, serta mampu memperkuat daya tahan Kota Bekasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

##### **5.1.1. Kaidah – kaidah pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Kerja BPKAD senantiasa menghadapi tantangan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada skala prioritas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi

hambatan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, melainkan menjadi dorongan untuk melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

BPKAD Kota Bekasi berkomitmen untuk melakukan penajaman alokasi anggaran dalam penyusunan rencana kerja, dengan menekan belanja yang kurang produktif serta mengalihkan sumber daya pada sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan dasar, infrastruktur perkotaan, penanganan sosial, serta penguatan aparatur pemerintah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Renja BPKAD dapat menjadi pedoman kerja yang mampu menjawab dinamika kondisi fiskal daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bekasi. Konsistensi dalam melaksanakan program prioritas, pengendalian belanja, serta penguatan pendapatan daerah akan menjadi kunci agar rencana kerja ini dapat diwujudkan secara optimal, meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

#### **5.1.2. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam upaya lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi dilakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan kapabilitas aparatur baik PNS maupun PPPK melalui kegiatan pembinaan pegawai yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, baik melalui forum formal maupun non formal;
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan serta kegiatan bimbingan teknik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP);

3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap satu bulan sekali dalam menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program / kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator kinerja yang diinginkan;
4. Memberikan “*punishment and reward*” terhadap pencapaian bidang terhadap program / kegiatan setiap tahun;
5. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pekerjaan agar tercapainya target program/ kegiatan perangkat daerah;
6. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi yang tepat guna, untuk mendukung proses kerja menjadi lebih efisien, akurat dan cepat.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026, semoga dapat menjadi dokumen kerja Perangkat Daerah yang bermanfaat dalam proses pencapaian tujuan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Bekasi ,

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Dan Aset Daerah Kota  
Bekasi



Yudianto, A.KS, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19711203 199203 1 005